

**MENILAI KEBERHASILAN DESENTRALISASI
(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)**



Oleh:

Nama : Mohammad Bhakti Setiawan

Nomor Mahasiswa : 07313016

Program studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**MENILAI KEBERHASILAN DESENTRALISASI
(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang srata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Mohammad Bhakti Setiawan

Nomor Mahasiswa : 07313016

Program studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis,



Mohammad Bhakti Setiawan
07313016

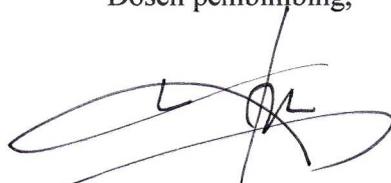
PENGESAHAN

**MENILAI KEBERHASILAN DESENTRALISASI
(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)**

Nama : Mohammad Bhakti Setiawan
Nomor Mahasiswa : 07313016
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Januari 2012

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen pembimbing,



Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.

Berita Acara Ujian Skripsi

Skripsi Berjudul

MENILAI KEBERHASILAN DESENTRALISASI

(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)

Di susun oleh : Mohammad Bhakti Setiawan

Nomor Mahasiswa : 07313016

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada tanggal : 14 Februari 2012

Pembimbing Skripsi : Dr. Abdul Hakim, M.Ec

Penguji I : Drs. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D

Penguji II : Drs, Moh. Bakti Hendrie Anto, M.Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

Kata Pengantar

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MENILAI KEBERHASILAN DESENTRALISASI (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)”**. Skripsi ini secara garis besar menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Krisis Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada yang paling diutamakan kepada ALLAH yang selalu memberikan semuanya sehingga saya tidak bisa membalas sampai kapan pun.
2. Kepada Ayah, Ibu, mas Yudha dan Puput atas jerih payah, cucuran keringat, dan Do'a yang kesemuanya itu untukku yang tak mungkin terbalaskan.
3. Kepada calon istriku Dian Noviza atas Do'a, semangat, perhatian dan kasih sayang mu.
4. Bapak Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D. Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Suharto, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Jaka Sriyana., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Anjar sang bopo guru jurusan IE yang banyak membantu dalam hal Akademik.
9. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Rindang Rayo Ranas., SE., Wisnu Adi Munggaran, Budi Susilo dan seluruh rekan-rekan IE 2007 serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian adalah teman-teman terbaik, bersama dengan kalian penulis bisa menemukan arti sebuah persahabatan dan kekompakkan, sukses buat kalian semua.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut berperan selama masa studi hingga diselesaikannya penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, Januari 2012
Penulis,

Mohammad Bhakti Setiawan
07313016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar isi	vii
Halaman Daftar Tabel	x
Halaman Daftar Gambar	xi
Halaman Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Desentralisasi.....	10
2.2. Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia	15
2.2.1 Definisi Pembangunan Manusia	15
2.2.2. Kosep Pembangunan Manusia dan pengukuran.....	17

2.2.3 Indeks Pemangunan Manusia: Pengukuran pencapaian Pembangunan	19
2.2.4 Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	23
2.3 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3.1 Mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.3.2 Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi	27
2.4 Pengeluaran Pemerintah.....	30
2.4.1 Pengeluaran Rutin	30
2.4.2 Pengeluaran Pembangunan	32
2.4.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	34
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Kerangka Pemikiran	39
2.7 Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2 Sumber Data.....	41
3.3 Pengukuran Variabel	41
3.4 Metode Analisis Data	42
3.5 Pendekatan Koreksi Kesalahan	45
3.5.1 Uji Akar Unit (<i>unit root test</i>).....	45
3.5.2 Uji Kointegrasi	46
3.5.3 Metode Koreksi Kesalahan	47
3.5.4 Uji Diagnostik Model	48

BAB IV HASIL DAN ANALISIS	51
4.1. Sumber data	51
4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia	51
4.2.1 Hasil Uji Akar Unit (<i>unit root test</i>)	51
4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi	53
4.2.3 Hasil <i>Error Correction Model</i> (ECM) EG Dua Tahap.....	53
4.2.4 Hasil Uji Diagnostik Model	56
4.2.4.1 Uji Heteroskedasitas	56
4.2.4.2 Uji Autokorelasi	57
4.2.5 Analisis Statistik.....	58
4.2.5.1 Uji Secara Individual (uji t)	59
4.2.5.2 Uji secara bersama-sama (Uji F)	62
4.2.5.3 Koefisien Determinasi	63
4.2.6 Analisis Ekonomi	63
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Implikasi/saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (1990 - 2010).....	5
4.1. Hasil Uji <i>Unit Root</i>	52
4.2. Hasil Uji Akar Terhadap Residual Persamaan Regresi	53
4.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White <i>no cross terms</i>	57
4.4. Hasil Uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 2	58



DAFTAR GAMBAR

4.1 Kurva Pengujian Terhadap Produk Domestik Bruto.....	60
4.2 Kurva Pengujian Terhadap Pengeluaran Pemerintah.....	61
4.3 Kurva Pengujian Terhadap Dummy Krisis	62



Abstraksi

Penelitian ini berjudul “Menilai Keberhasilan Desentralisasi (Indeks Pembangunan Manusia)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Krisis Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Model analisis yang digunakan adalah model *Error Correction Model* (ECM), dengan data time series tahunan Periode 1990 – 2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan United Nation Development Program. Pengujian statistic meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji t, uji F, dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu heterokedastisitas dan autokorelasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Krisis Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil regresi antara Variable Dependen dengan Variabel Independen adalah R-square = 0.612178 dan F-Statistik = 8.944855 sehingga secara bersama-sama variable Produk Domestik Bruto dan Krisis Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya variable Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk pengujian asumsi klasik tidak terdapat heterokedastisitas dan autokorelasi. Sehingga mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variable atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki akhir dekade 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU 32/2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk: (1) memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; (2) mendorong kerjasama antar pemerintah daerah; (3) menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien; (4) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah; (5) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah; serta (6) menata daerah otonom baru (DOB).

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap

daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida 2005).

Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia. Hingga tahun 2004, terjadi penambahan pemerintah propinsi dari 26 menjadi 33 (26,9 %) dan pemerintah kabupaten/kota dari 303 menjadi 440 (45,2%). Pada tahun 2005 pemerintah pusat untuk sementara waktu menangguhkan pemekaran daerah, namun hingga akhir tahun 2006 gejolak usulan pemekaran daerah terus berlanjut. Terdapat usulan pembentukan 114 kabupaten/kota serta 21 propinsi. Kebijakan penangguhan sementara pemekaran daerah selama 2005 – 2006 sulit bertahan mengingat hingga saat ini belum ada dasar yang kuat untuk itu, meskipun Depdagri menilai bahwa perkembangan

daerah otonom baru (DOB) belum optimal karena berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi (Depdagri 2005). Di samping itu, belum adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan jumlah daerah juga mendorong daerah terus mengajukan pemekaran daerah. Dengan desakan yang kuat dari daerah maka pada tahun 2007 terjadi lagi tambahan jurisdiksi daerah di Indonesia.

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama berlangsung. Indikator kenaikan pendapatan perkapita yang pada waktu lalu menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan telah digugat bukan saja oleh kalangan non-ekonomi, melainkan juga oleh para ekonom sendiri yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, yang kemudian memunculkan beberapa alternatif dan pelengkap atas indikator pendapatan per kapita tersebut. Di antara indikator yang belakangan ini banyak digunakan adalah berkaitan dengan unsur pembangunan manusia. Cynthia Taft Morris memunculkan indeks yang dikenal dengan *The Physical Quality of Life Index (PQLI)*, sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* secara komprehensif mengajukan *Human Development Index (HDI)* atau *Indek Pembangunan Manusia (IPM)* yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia (Todaro, 2000).

Konsep IPM mulai mendapat perhatian sejak laporan pertama yang dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1990, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini

dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kondisi perekonomian Indonesia yang cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni masing-masing 5,9% ditahun 1986, kemudian 6,9% ditahun 1988 dan menjadi 7,5% ditahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan 1991 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami kemunduran walaupun bernilai positif yakni masing-masing 7,0% di dua tahun tersebut. kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, dan 1997, masing-masing sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, 5,8%, dan 4,7%. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tajam menjadi -13,13% disebabkan krisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa negara-negara Asia. Tahun-tahun berikutnya perekonomian indonesia perlahan bangkit menunjukkan perbaikan.

Perkembangan pembangunan manusia Indonesia yang selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an, sedangkan untuk Anggaran Pengeluaran Pemerintah sendiri, baik itu Pengeluaran rutin maupun Pengeluaran Pembangunan (sekarang telah digabungkan) mulai diperhatikan dan dirasakan peningkatannya mulai dari tahun

1990-an, yang selama ini pemerintah hanya sibuk dalam mengurus pembangunan infrastruktur, pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan relatif sedikit, sedangkan investasi di Indonesia yang di harapkan sebagai modal untuk membuka lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat mengalami pasang surut akibat keadaan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil. (IHDR, 2004).

Tabel 1.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (1990 - 2010)

Tahun	IPM
1990	0,499
1991	0,515
1992	0,637
1993	0,641
1994	0,668
1995	0,679
1996	0,643
1997	0,681
1998	0,67
1999	0,677
2000	0,684
2001	0,682
2002	0,692
2003	0,697
2004	0,711
2005	0,728

Tabel 1.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 1990 – 2010 (lanjutan)

Tahun	IPM
2006	0,726
2007	0,731
2008	0,711
2009	0,717
2010	0,613

Sumber: UNDP (Lampiran 1)

Sejak tahun 1990 sampai dengan 1995 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia umumnya mengalami peningkatan. Penurunan pernah terjadi yakni pada tahun 1996 dan 1998. Dan meningkat kembali mulai sejak tahun 1999 hingga 2005, kemudian pada tahun 2006 terjadi sedikit penurunan dan pada tahun 2007 IPM Indonesia meningkat kembali. Penurunan juga terjadi pada tahun 2008, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Menilai Keberhasilan Desentralisasi (Indeks Pembangunan Manusia)“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh krisis ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pengembangan daerah di Indonesia.

2. Pemerintah Daerah

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pedokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat ini akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV. HASIL DAN ANALISA

Dalam bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab yang terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi ini muncul sebagai hasil simpulan

sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dapat ditarik benang merah
apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Desentralisasi

Dalam teori pemerintahan dijelaskan secara garis besar dikenal adanya dua model dalam formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah independen yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Kemudian negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut sepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Sementara itu, dalam negara kesatuan asumsi dasarnya adalah formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Diasumsikan di sini bahwa negara adalah sumber kekuasaan. Menurut Andi Mallarangeng dan M. Ryaas Rasyid (1999), kekuasaan daerah pada

dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan, dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom.

Hal ini sejalan dengan pemikiran pemerintahan yang demokratis, yakni suatu pemerintahan yang dilakukan atas dasar dari kepentingan rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, sumber otoritas dan kewenangan mengatur pemerintahan berasal dari rakyat pula. Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem desentralisasi. Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) tahun 1994 menyatakan bahwa dari 100 negara demokratis, 95% di antaranya telah melaksanakan sistem desentralisasi.

Dalam *the 6th Global Forum* (2005) dinyatakan bahwa desentralisasi merupakan solusi yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Bahkan di dalam *Deklarasi Seoul* yang berkenaan dengan pemerintahan daerah juga menyatakan bahwa : “Suatu tata pemerintahan yang baik itu bisa dicapai jika dipenuhi suatu tingkat desentralisasi, inovasi dan pembangunan pemerintah daerah yang memadai. Administrasi dan otonomi pemerintahan daerah bisa diwujudkan lebih efektif melalui peningkatan desentralisasi baik secara administratif maupun finansial, digitalisasi pemerintahan, dan tata manajemen yang berdasakan hasil”. Dengan demikian ciri pemerintahan yang demokratis salah satunya adalah melakukan desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya.

Desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri adalah sebuah konsep yang dipakai banyak negara sebagai salah satu strategi pembangunan. Selain dipandang positif

dari sisi efektifitas manajemen pemerintahan, pelaksanaan desentralisasi juga dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara untuk menentukan sendiri nasib dan mengapresiasi keinginannya secara bebas (Setiyono, 2004: 205).

Menurut Alm, Aten dan Bahl, secara sederhana desentralisasi dijelaskan sebagai proses perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah dari tingkat nasional kepada tingkat daerah. Bahkan Cheema dan Rondinelli menyatakan bahwa secara empiris transfer itu juga meliputi proses perencanaan pemerintahan, manajemen, dan pengambilan keputusan (Setiyono, 2004: 205).

Hampir semua urusan/kewenangan pemerintah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan pokok seperti agama, pertahanan, moneter, peradilan dan hubungan luar negeri. Perubahan terhadap tata penyelenggaraan tersebut juga membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara. Dalam hal status kepegawaian misalnya, dengan diserahkannya urusan kepada daerah, otomatis terjadi pelimpahan personel aparat dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Beberapa alasan dianutnya desentralisasi menurut Gie (1967) antara lain untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Sedangkan Gaffar (2002) menyebutkan alasan dalam rangka efisiensi-

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas politik, bahwa kebijakan yang dibentuk dipertanggungjawabkan dan bersifat *legitimate* karena masyarakat terlibat sejak awal penentuan kebijakan.

Konsep desentralisasi dalam ilmu administrasi publik dijelaskan sebagai sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*delegation of authority and responsibility*) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Kebijakan desentralisasi menyangkut perubahan hubungan kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan.

Melalui desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat, antara lain efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, memungkinkan melakukan inovasi, meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas. Desentralisasi juga dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih luas atau dengan kata lain memberi dukungan yang lebih konstruktif di dalam proses pengambilan keputusan. McGregor (1967) bahkan menegaskan, jika kita dapat menekan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah, maka kita akan cenderung memperoleh keputusan-keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, desentralisasi bukan saja akan dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas daripada pengambilan keputusan, karena orang cenderung untuk tumbuh dan berkembang secara lebih cepat manakala mereka dimotivasi secara efektif dan ini bisa terjadi jika kewenangan pengambilan keputusan didesentralisasikan.

Menurut Cheema dan Rondinelli, secara garis besar terdapat 4 (empat) makna konsep desentralisasi:

1. Desentralisasi diartikan sebagai dekonsentrasi. Pada makna ini, desentralisasi diterjemahkan sebagai pelimpahan beban kerja dari pemerintah pusat kepada *staff* atau wakil pusat di daerah tanpa diikuti dengan transfer kewenangan untuk mengambil keputusan.
2. Desentralisasi sebagai pendelegasian kewenangan dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke suatu organisasi di daerah yang tidak secara langsung berada dalam kontrol pemerintah pusat. Pendelegasian ini merupakan pendelegasian untuk fungsi khusus, atau urusan khusus.
3. Desentralisasi diartikan sebagai devolusi yaitu penyerahan fungsi dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi dalam pengertian ini merupakan desentralisasi dalam arti yang sesungguhnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola urusannya secara mandiri. Tidak ada kontrol dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan urusan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah benar-benar otonom dan bebas dari intervensi pemerintah pusat.
4. Penyerahan fungsi pemerintah pusat kepada lembaga non pemerintah (privatisasi), pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat atau dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta, misalnya BUMN dan BUMD menjadi PT (Purwanto dan Kumorotomo, 2005: 66).

2.2. Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia

2.2.1. Definisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketarampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Subjek sekaligus objek pembangunan, berarti manusia pelaksana dan peminat pembangunan. Publikasi ini menempatkan manusia bukan sekedar tujuan yang penting untuk dicapai, tetapi juga akan menjadi fondasi untuk demokrasi yang kuat dan mempersatukan masyarakat karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pembangunan yang menurut konsep pembangunan manusia. Konsep pembangunan yang seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pembangunan di bidang lainnya.

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Mengingat manusia sebagai subjek dan objek pembangunan maka manusia di dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan.

Konsep pembangunan manusia dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, dapat tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur yang panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi, sehingga dapat mewujudkan kehidupannya mencapai standar hidup layak.

Secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP) Input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai manfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai objek perubahan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat untuk tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan sesuai UNDP (1966).

2.2.2. Konsep Pembangunan Manusia dan pengukuran

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan hidup yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang UNDP mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian kemajuan

pembangunan sosial ekonomi. HDI mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi HDI yang direpresentasikan, kemajuan pembangunan sosial ekonomi, HDI, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang, sehat, pengetahuan dalam kehidupan yang ks. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah melek huruf dan rata-rata lama sekolah sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Dalam konsep tersebut ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995: 12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagia dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan

yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Pemangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Paradigma pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti sampai disana. Masih perlu pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politi, ekonomi, dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, cultural, sosial, dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustasi masyarakat.

2.2.3 Indeks Pemangunan Manusia: Pengukuran pencapaian Pembangunan

Pembangunan nasional menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian dijabarkan kedalam Repelita adalah pembangunan yang menganut konsep pembangunan manusia. Konsep Pembangunan Manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara spriritual. Bahkan secara ekplisit disebutkan bahwa pembangunan sumber

daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu prinsip pembangunan manusia yang dijabarkan dalam trilogi pembangunan yang akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk program pembangunan. Melalui strategi delapan jalur pemerataan, kebijaksanaan pembangunan yang mengarah pada pemilikan terhadap kelompok penduduk yang tertinggal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dan kesehatan yang program pembangunan yang dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Disektor ekonomi bahwa azas pemerataan akan diimplementasikan dengan cara memberikan kredit modal usaha untuk petani berupa Kredit Usha Tani (KUT), yang diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk peningkatan produksi ataupun pendapatan petani, oleh karena sector pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Selain itu juga diupayakan pemberdayaan masyarakat bagi penduduk miskin melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Kukesra serta Takesra.

Untuk menyerap tenaga kerja disuahkan penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan membuka kesempatan kerja dan berusaha memungkinkan peningkatan pendapat penduduk terutama penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya tersebut diharapkan masyarakat memperoleh pendapatan yang menciptakan daya beli. Hal ini merupakan jembatan utama dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya merupakan prinsip pemberdayaan.

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan jika penduduk tersebut kurang kualitas, namun akan menjadi beban pembangunan jika penduduk tersebut kurang kualitasnya. Untuk menciptakan pembangunan manusia yang berkualitas diharapkan pertama sekali terlaksana dalam keluarga melalui penerapan keluarga kecil sejahtera. Program pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana diharapkan dapat mengendalikan jumlah penduduk, sehingga angka kelahiran dapat diturunkan. Dengan penurunan angka kelahiran dapat mempercepat proses peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian pembangunan bidang sosial sangat terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks pembangunan manusia.

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan telah dilakukan disuatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pelaksanaan pembangunan terhadap peningkatan kualitas manusia selaku penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun belum dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar

tersebut adalah umur yang panjang dan sehat, mengukur peluang hidup ataupun harapan hidup, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar, dengan menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar perhitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir (E0), pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumtif. Nilai HDI suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat HDI suatu wilayah terhadap angka 100, semakin baik dan sempurna keadaan pembangunan manusia di wilayah tersebut dan semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Komponen HDI hanya mencakup tiga komponen yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan atau pengetahuan dan daya beli. Maka sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia yang harus diadakan. Oleh karena itu dasar HDI perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti stabilitas politik, rasa aman, kebutuhan rohani atau spiritual,

sanitaslingkuangan dan perumahan, kebebasan mengeluarkan pendapat, pemerataan antar generasi dan lain-lain.

2.2.4 Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Adapun komponen HDI disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas:

$$\text{HDI} = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Dimana :

X1 = Lamanya Hidup

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Tingkat Kehidupan Yang Layak

$$\text{Indeks X(I,J)} = (X(I,J) - X(t-\text{min})) / (X(I,J) - X(t-\text{max}))$$

Dimana :

X(I,J) = Indikator ke- I dari daerah J

X(t-min) = Nilai minimum dari Xt

X(t-max) = Nilai maksimum dari Xt

Untuk setiap komponen HDI:

$$\text{HDI} = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Definisi PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu domestik atau agregat.

2.3.1 Mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu kegunaan penting dari data-data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dalam penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pada harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh penambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga yang berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk menilai barang

dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.

Penghitungan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulan dan tahunan. Adapun konsep penghitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode (Rahardja. 2000:178), yaitu :

$$G_t = \frac{(PDBR_t - PDBR_{t-1})}{PDBR_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDBR_t$ = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$ = PDBR satu periode sebelumnya

Jika interval waktu lebih dari satu periode maka perhitungan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan eksponensial :

$$PDBR_t = PDBR_0 (1+r)^t$$

Dimana:

$PDBR_t$ = PDBR periode t

$PDBR_0$ = PDBR periode 0

r = tingkat pertumbuhan

t = jarak periode

Penghitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. PDB menurut harga berlaku

Dimana PDB dengan faktor inflasi yang masih terkandung didalamnya.

2. PDB menurut harga konstan

Dimana PDB dengan meniadakan faktor inflasi. Artinya pengaruh perubahan harga telah dihilangkan .

Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional atau regional, maka ada tiga metode pendekatan yang dipakai :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Secara matematis :

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n$$

Dimana:

NI = PDB (Produk Domestik Bruto)

P_1, P_2, \dots, P_n = Harga satuan produk pada satuan masing-masing sector ekonomi

Q_1, Q_2, \dots, Q_n = Jumlah produk pada satuan masing-masing sector ekonomi

Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Metode ini dihitung dengan menjumlah besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor-faktor produksi. Secara matematis :

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i + Y_p$$

Dimana:

Y = Pendapatan nasional atau PDB

Y_w = Pendapatan Upah / gaji

Y_r = Pendapatan sewa

Y_i = Pendapatan bunga

Y_p = Pendapatan laba atau profit

3. Pendapatan Pengeluaran

Metode ini dihitung dengan menjumlah semua pengeluaran yang dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Secara matematis :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

di mana :

Y = PDB (Pendapatan Domestik Bruto)

C = Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen untuk konsumsi

I = Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan untuk investasi

G = Pengeluaran Rumah Tangga Pemerintah

$X-M$) = Ekspor netto atau pengeluaran rumah tangga luar negeri

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja, untuk menghindari adanya perhitungan ganda.

2.3.2 Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (*Neo Classic Growth Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan berdasarkan teori-teori klasik sebelumnya yang telah disempurnakannya. Adapun beberapa beberapa asumsi penting dalam memahami model Solow (Rahardja. 2001:195):

- a. Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi).
- b. Tingkat despresiasi dianggap konstan.
- c. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal.
- d. Tidak ada sektor pemerintah.

- e. Tingkat pertambahan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan.
- f. Dalam mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

2. Teori Pertumbuhan Endogenus (*Endogenous Growth Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Romer (1986) ini merupakan perkembangan mutakhir teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik (Rahardja, 2001:199). Dalam teori ini disebut bahwa teknologi bersifat endogenus. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*) sehingga mengakibatkan terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang lebih dulu maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertambahan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama. Teknologi merupakan barang publik. Artinya teknologi dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian. Sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen.

3. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan *entrepreneurship*. Schumpeter berpendapat bahwa kalangan pengusaha yang memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi,

penyusunan teknik-tahap produksi maupun sistem manajemennya. Schumpeter berpandangan kemajuan perekonomian disebabkan diberikanya kebebasan untuk para *entrepreneur* (Rahardja. 2001:200). Namun, Kebebasan ini dapat menimbulkan monopoli pasar yang nantinya akan memunculkan masalah non ekonomi sehingga akan dapat menghancurkan sistem kapitalis tersebut.

4. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut W.W. Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan social dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya "*The Stage of Economic*" (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, (Suryana, 2000: 61) yaitu:

- a. Tahap masyarakat tradisional (*The Traditional Society*),
- b. Tahap peletakan dasar untuk tinggal landas (*The Preconditional Society*),
- c. Tahap tinggal landas (*The take Off*),
- d. Tahap gerak menuju kematangan (*The Drive to Martirity*),
- e. Tahap era konsumsi tinggi massa (*The Age of High Mass Consumption*)

2.4 Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari pada penerimaan ($G < T$), sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan ($G > T$).

Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sampai dengan tahun 2004, rincian belanja pemerintah pusat terdiri dari: (1) pengeluaran rutin dan (2) pengeluaran pembangunan. Namun sejak tahun 2005 mulai diterapkan penyatuan anggaran (*unified budget*) antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2.4.1 Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan

aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 1989).

Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah terutama dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, lonjakan kenaikan pengeluaran pemerintah yang terjadi pada pos pembayaran utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada implikasi saat pengembalian (amortisasi).

Dalam kasus pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang oleh pemerintah akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena terjadi transfer pendapatan dari kelompok masyarakat yang membayar pajak kepada kelompok masyarakat yang menjadi kreditur. Dampak dari aliran dana ini masih berputar di dalam negeri karena masing – masing pihak adalah warga negara Indonesia. Sedangkan dalam kasus pinjaman luar negeri, terjadi aliran dampak ekonomi (*multiplier effect*) yang berbeda. Pihak – pihak yang menerima pengembalian pinjaman adalah pihak kreditur luar negeri (Mangkoesebroto, 1994).

Jumlah utang luar negeri yang semakin besar menyebabkan anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pembayaran bunga utang tersebut selain disebabkan oleh membengkaknya jumlah jatuh tempo juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selain pengeluaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, pos lain yang menarik adalah pengeluaran pemerintah untuk berbagai subsidi. Satu pos diantaranya yang berperan cukup besar adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi ini muncul pada tahun 1997/1998 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia menyebabkan meningkatnya biaya pengadaan BBM hingga melebihi hasil penjualan BBM itu sendiri, akibatnya pemerintah terpaksa memberikan subsidi terutama terhadap minyak tanah dan solar.

2.4.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum, baik pembangunan fisik ataupun non fisik. Perana anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia, maka pencapaian sasaran – sasaran pembangunan harus dilakukan secara seoptimal mungkin (Nota Keuangan dan APBN, 2004). Sehubungan dengan hal tersebut,

formulasi distribusi alokasi dan penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijakan fiskal.

Disamping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber – sumber pembiayaan dalam negeri dan pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk Departemen Hankam, dan Pemerintah Daerah, yang diklasifikasikan kedalam dana pembangunan yang dikelola oleh instansi pusat, dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Djamin,1993).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri, maka pembiayaan proyek masih tetap di butuhkan. Pada tahun 1994 – 2004 pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari luar negeri diupayakan untuk secara bertahap dikurangi. Untuk itu, pembiayaan proyek harus dimanfaatkan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih transparan, efektif, dan efisien. Dengan demikian pemilihan proyek – proyek yang pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri harus dilakukan berdasarkan prioritas sehingga dapat mendukung penciptaan sasaran.

2.4.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G$ merupakan pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini di kenal dengan identitas pendapatan nasional. variabel Y (pendapatan nasional), C (pengeluaran konsumsi), dan G (pengeluaran pemerintah). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat di ketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy,1997). apabila ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan Y , maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{I}{Y} + \frac{G}{Y}$$

$$1 = APC + \frac{I}{Y} + \frac{G}{Y}$$

Menurut Keynes untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi penurunan nilai APC (*Average Propensity to Consume*) dalam perekonomian. Pendapatan setelah diperhitungkan transfer pemerintah dan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah disebut sebagai *disposable income*. Dengan perkataan lain, besarnya *disposable income* suatu masyarakat sama dengan besarnya transfer pemerintah (Tr) dikurangi

besarnya pajak (*Tax*) yang dipungut oleh pemerintah. Persamaanya adalah sebagai berikut (Reksoprayitno,1985):

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Dari persamaan tersebut, dapat diturunkan persamaan di bawah ini :

$$Y = Y_d + T_r - T_x, \text{ maka}$$

$$C + I + G = Y = Y_d + T_r - T_x$$

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian Fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah meleksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuanya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami kegiatan yang berlebihan (*over - heating*). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dean melalui efek pengganda menciptakan tambahan lapangan pekerjaan (Kamaluddin, 1999).

2. Teori Peacock dan Wiseman

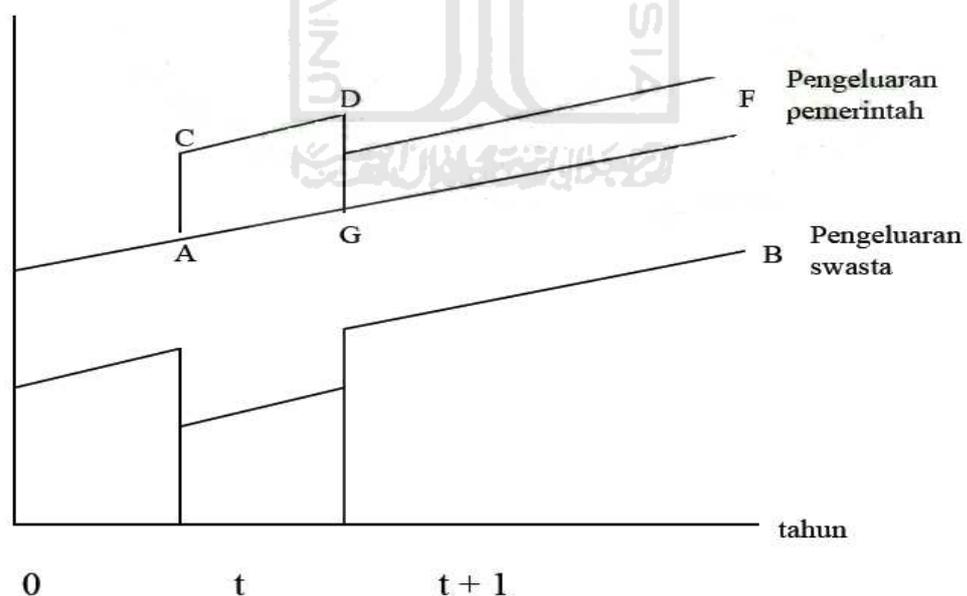
Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi masalah tersebut.

Konsekuensinya menimbulkan tuntutan untuk memperoleh penerimaan dari pajak yang lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut sebagai efek pergantian (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan kegiatan swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak cukup dibiayai semata – mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban membayar utang dan membayar bunga.

Pengeluaran pemerintah semakin bertambah, bukan hanya karena GNP meningkat, tetapi juga karena adanya kewajiban baru tersebut.

Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang hal ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah, efek ini disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan pemerintah sehingga setelah perang selesai, tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini (Mangkoesebroto, 2001):



Gambar 2.1. Teori Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal dari t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana ditunjuk garis AG. Apabila

pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meniongkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai (pada tahun $t+1$), pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah memerlukan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pemerintah.

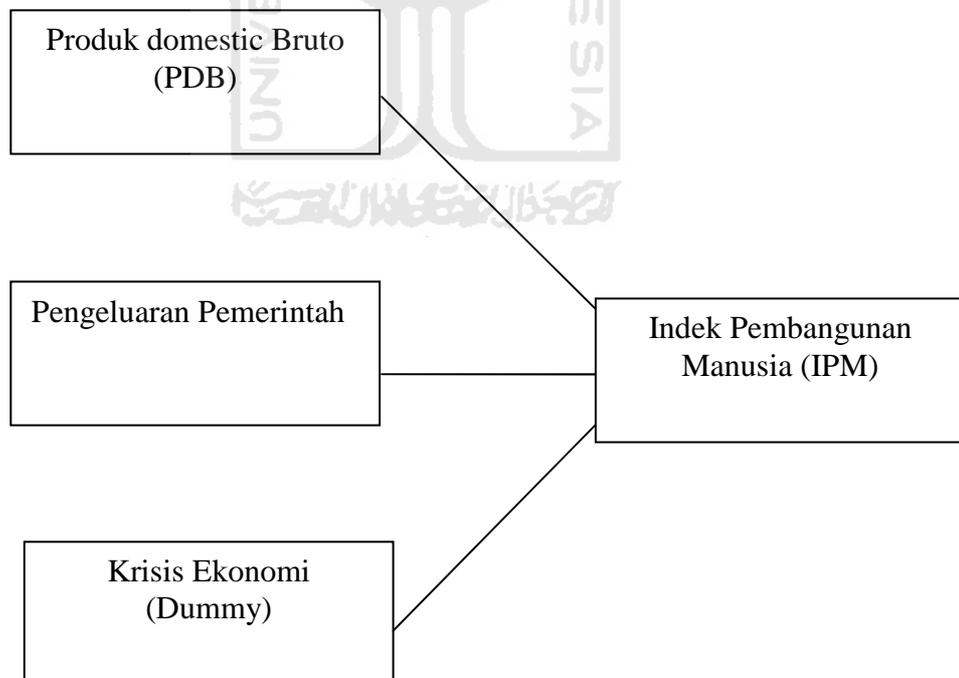
2.5 Penelitian Terdahulu

Gunadi Brata (2005) Pada penelitian ini Brata menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan (*IPP*), investasi swasta (*IS*) dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini (*IG*) terhadap indeks pembangunan manusia (*IPM*) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula *IPM* dicapai. Variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap *IPM*. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Variabel *IG* berpengaruh positif terhadap *IPM*, artinya semakin merata distribusi pendapatan semakin baik pula pembangunan manusia. Variabel lag *IG* menunjukkan pengaruh negatif yang berarti pada jangka panjang akan semakin sulit meningkatkan kualitas SDM melalui distribusi pendapatan.

Kuriata Ginting S (2008) menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan,

rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefien regresi variabel-variabel bebas, yakni: $-0,9829$ untuk variabel konsumsi rumah tangga untuk makanan, $1,2774$ untuk konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan, $26,6791$ untuk pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan -0.214 untuk rasio penduduk miskin. Variabel *dummy* menunjukkan pengaruh negatif.

2.6 Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
3. Krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Konsentrasi penelitian ini adalah pada analisis perkembangan pembangunan manusia di Indonesia dengan representasi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena hingga saat ini IPM adalah alat ukur pembangunan manusia yang terbaik dan paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian sejenis. Dalam penelitian ini akan dikaji 2 (dua) variabel penjelas dan 1 (satu) variabel *dummy* yang dianggap mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia.

3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah sumber data tidak langsung (sekunder). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari buku laporan, dokumen, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY.

3.3. Pengukuran Variabel

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Independent variable/variabel bebas

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 1999 dalam Algifari, 2003). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah

- a. Produk Domestik Bruto (PDB) (PDB)
- b. Pengeluaran Pemerintah (PP)
- c. Krisis ekonomi (DK)

2. Dependent variable/variabel tergantung

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 1999 dalam Algifari, 2003), dalam penelitian ini variabel tergantung yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.4. Metode Analisis Data

a. Teori Error Correction Model

Analisis yang digunakan dalam ilmu ekonometrika adalah analisis regresi yang pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu peubah yaitu peubah terikat pada peubah lainnya yang disebut peubah bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari peubah yang diketahui (Gujarati, 1988).

Metode yang sering digunakan menaksir parameter dalam model regresi adalah metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square (OLS)*) karena metode ini mudah dipahami dan prosedurnya sederhana (Nachrowi, 2006). Berdasarkan model dasar tersebut akan dikembangkan lagi menjadi model empiris dengan pendekatan kointegrasi yaitu model penyesuaian partial (*Partial Adjustment Model (PAM)*) dan model koreksi kesalahan (*ECM*)

Teori ECM yang merupakan kepanjangan dari *Error Correction Model*, dalam bahasa Indonesia berarti metode koreksi kesalahan adalah suatu model

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari masing – masing variabel independent terhadap variabel dependent. Menurut Sargan, Engle dan Granger, *Error Correction Model* adalah teknik terbaik untuk mengkoreksi ketidak seimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang serta dapat menjelaskan hubungan antara peubah terikat dengan peubah bebas pada waktu sekarang dan waktu lampau.

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*). Dalam konteks ekonomi, spesifikasi model dinamis penting artinya karena berkaitan dengan pembentukan model dari suatu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perubahan waktu (Insukindro,1992). Dalam perekonomian, ketergantungan variabel dependen dan independen jarang terjadi secara seketika, hal ini disebabkan karena adanya selang waktu yang biasa disebut lag (kelambanan) (Gujarati, 2003).

Alasan digunakan variabel lag dalam analisis model linier dinamik adalah:

- a. alasan psikologis, yaitu adanya unsur kebiasaan di mana orang tidak mudah merubah perilakunya secara mendadak
- b. alasan teknologi, terdapat kesulitan secara teknis
- c. alasan kelembagaan, adanya regulasi yang mengakibatkan lambatnya reaksi (Gujarati,2003)

Model dinamis yang relatif baik untuk digunakan adalah model koreksi kesalahan (ECM),dimana faktor gangguan yang merupakan “equilibrium error”

diparameterisasi. Kesalahan ekuilibrium ini dapat digunakan untuk mengkaitkan perilaku jangka pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi pada periode berikutnya, sehingga mekanisme model koreksi kesalahan dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang (Insukindro, 1990).

Manfaat dari penggunaan model dinamis sendiri adalah untuk menghindari masalah regresi lancung (*spurious regression*). Suatu regresi linier dikatakan lancung bila anggapan dasar klasik regresi linier tidak terpenuhi. Akibat yang ditimbulkan oleh suatu regresi lancung antara lain: koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak sah (*invalid*) (Insukindro, 1991).

b. Regresi Dengan Variabel *Dummy* (Boneka)

Di dalam metodologi penelitian dikenal ada sebuah variabel yang disebut dengan *dummy variable*. Variabel ini bukan jenis lain dari variabel dependen-independen, namun menunjukkan sebuah variabel yang nilainya telah ditentukan oleh peneliti. Donald Cooper dan Pamela Schindler (2000) mendefinisikan *dummy variable* sebagai sebuah variabel nominal yang digunakan di dalam regresi berganda dan diberi kode 0 dan 1 (Rahmat Febrianto, 2010).

Analisis regresi tidak saja digunakan untuk data-data kuantitatif (misal : dosis pupuk), tetapi juga bisa digunakan untuk data kualitatif (misal : musim panen). Jenis data kualitatif tersebut seringkali menunjukkan keberadaan klasifikasi (kategori) tertentu, sering juga dikategorikan variabel bebas (X) dengan

klasifikasi pengukuran nominal dalam persamaan regresi. Sebagai contoh, bila ingin meregresikan pengaruh kondisi kemasan produk dodol nenas terhadap harga jual. Pada umumnya, cara yang dipakai untuk penyelesaian adalah memberi nilai 1 (satu) kalau kategori yang dimaksud ada dan nilai 0 (nol) kalau kategori yang dimaksud tidak ada (bisa juga sebaliknya, tergantung tujuannya). Dalam kasus kemasan ini, bila kemasannya menarik diberi nilai 1 dan bila tidak menarik diberi nilai 0. Variabel yang mengambil nilai 1 dan 0 disebut variabel *dummy* dan nilai yang diberikan dapat digunakan seperti variabel kuantitatif lainnya. (www.deptan.go.id)

Pengolahan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengelompokkan data, kemudian ditabelkan sesuai keperluan. Data yang telah ditabelkan dipersiapkan sebagai input komputer sesuai dengan model yang digunakan. Perhitungan analisis dilakukan dengan piranti lunak Eviews 5.1

3.5 Pendekatan Koreksi Kesalahan

3.5.1 Uji Akar Unit (*unit root test*)

Hal penting yang berkaitan dengan studi atau penelitian dengan menggunakan data *time series* adalah stasioneritas. Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan *Spurious Regression*, yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik padahal dalam kenyataannya tidak.

Pengujian akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya *unit root* yaitu dengan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF Test). Data dikatakan

stasioner jika nilai ADF test statistik lebih kecil dari nilai tabel *MacKinnon*.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 = data tidak stasioner (mengandung unit root),

H_a = data stasioner (tidak mengandung unit root)

Penolakan hipotesis nol menunjukkan data yang dianalisis adalah stasioner. Variabel dikatakan tidak stasioner, jika terdapat hubungan antara variabel tertentu dengan waktu atau *trend*.

3.5.4 Uji Kointegrasi

Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang (*equilibrium*) antara variabel-variabel yang tidak stasioner dan residual dari kombinasi linier tersebut harus stasioner. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kestabilan jangka panjang antara variabel-variabel yang ada sehingga dapat digunakan dalam sebuah persamaan. Metode yang umum digunakan dalam pengujian ini adalah metode *Engle-Granger Cointegration Test*.

Metode kointegrasi Engle-Granger sebetulnya menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan meregresikan persamaan variabel dependen dengan variabel independen (Indeks Pembangunan manusia dengan Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Krisis Ekonomi) kemudian didapatkan residual (U) dari persamaan tersebut. Tahapan kedua dilakukan dengan menggunakan metode ADF yang menguji akar-akar unit terhadap U dengan hipotesis yang sama dengan hipotesis akar-akar unit ADF sebelumnya.

Jika hipotesis nol ditolak atau signifikan maka variabel U adalah stasioner atau dalam hal ini ada kombinasi linier antara indeks pembangunan manusia dengan produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, krisis ekonomi, atau stasioner untuk $U = I(0)$. Artinya, meskipun variabel-variabel yang digunakan tidak stasioner namun dalam jangka panjang variabel-variabel tersebut cenderung menuju pada keseimbangan. Oleh karena itu, kombinasi linier dari variabel-variabel ini disebut regresi kointegrasi dan parameter-parameter yang dihasilkan dari kombinasi tersebut dapat disebut sebagai *co-integrated parameters* atau koefisien-koefisien jangka panjang. Indeks Pembangunan manusia = f (Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Krisis Ekonomi),

$$IPM_t = b_0 + b_1 PDB_t + b_2 PP_t + b_3 DK_t + U_t$$

dimana :

IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto periode t ,

PP_t = Pengeluaran Pemerintah periode t ,

DK_t = Dummy Variabel

U_t = error distribunce periode t .

3.5.3 Metode Koreksi Kesalahan

Hasil estimasi pada pengujian akar-akar unit dan kointegrasi dapat digunakan untuk mengestimasi model dengan menggunakan model koreksi kesalahan atau *error correction model* (ECM)

$$DIPM_t = \beta_1 DPDB_t + \beta_2 DPP_t + \beta_3 DK_t + Resid(-1) + e_t$$

dimana :

D = Perbedaan pertama (*first difference*),

IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto periode t ,

PP_t = Pengeluaran Pemerintah periode t ,

DK_t = Dummy Variabel

$Resid(-1)$ = Residual Periode Sebelumnya

e_t = error distribunce periode t .

Untuk mengetahui apakah spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid maka dilakukan uji terhadap koefisien *Error Correction Term* (ECT). Jika hasil pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka spesifikasi model yang diamati valid.

3.5.4 Uji Diagnostik Model

Pada penelitian ini menggunakan pengujian pelanggaran asumsi klasik (Gujarati, 1978), yaitu (1) Uji heteroskedastisitas, dan (2) Uji Autokorelasi.

1. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linier klasik adalah varian residual bersifat homoskedastik atau bersifat konstan. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka varian residual tidak lagi bersifat konstan disebut dengan heteroskedastisitas. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas yaitu :

- a. Estimasi dengan menggunakan ECM tidak akan memiliki *varians* yang minimum atau estimator tidak efisien,
- b. Prediksi (nilai Y untuk X tertentu) dengan estimator dari data yang sebenarnya akan mempunyai *varians* yang tinggi sehingga prediksi menjadi tidak efisien,
- c. Tidak dapat diterapkan selang kepercayaan dengan menggunakan formula yang berkaitan dengan nilai *varians*.

Pengujian yang dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah data yang diamati terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan uji ARCH LM (ARCH LM *test*) dan uji *white heteroskedasticity (no cross term)*. Apabila nilai *probability Obs*R-squared* lebih kecil dari taraf nyata berarti terdapat gejala heteroskedastisitas pada model, namun bila nilai *probability Obs*R-squared* lebih besar dari taraf nyata berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model.

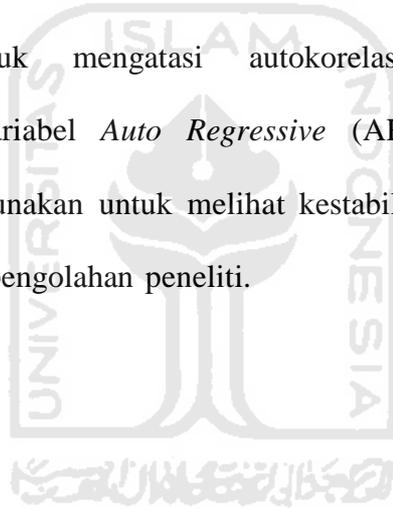
2. Uji Autokorelasi

Masalah autokorelasi merujuk pada hubungan *error term* antar dua pengamatan. Autokorelasi terjadi pada serangkaian data runtut waktu, dimana *error term* pada satu periode waktu secara sistematis tergantung kepada *error term* pada periode-periode waktu yang lain. Konsekuensi dari adanya autokorelasi yaitu *varians* yang diperoleh dari estimasi dengan ECM bersifat *under estimate*, yaitu nilai *varians* parameter yang diperoleh lebih kecil daripada nilai

varians yang sebenarnya.

Uji yang digunakan untuk mendeteksi apakah pada data yang diamati terjadi autokorelasi atau tidak adalah uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*. Apabila nilai *probability Obs*R-squared* lebih besar dari taraf nyata maka tidak ditemukan gejala autokorelasi pada model, namun bila nilai *probability Obs*R-squared* lebih kecil dari taraf nyata maka ditemukan gejala autokorelasi pada model.

Cara untuk mengatasi autokorelasi adalah dengan menambahkan variabel *Auto Regressive (AR)*. Uji pelanggaran asumsi klasik digunakan untuk melihat kestabilan elastisitas jangka pendek dari hasil pengolahan peneliti.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data *time series* atau data runtun waktu sebanyak 21 observasi, yaitu mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), *United Nation Development Program* (UNDP), dan lembaga lain yang terkait. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu produk domestik bruto (PDB), pengeluaran pemerintah (PP), dan dummy krisis (DK), sedangkan variabel dependennya adalah indeks pembangunan manusia (IPM).

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian dan hasil akhir estimasi. Pengujian yang dilakukan antara lain uji stasioneritas data dan uji ekonometrika yaitu uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Pembahasan ekonomi bertujuan untuk menganalisis hasil estimasi dengan keadaan yang sebenarnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Alasan menganalisis persamaan dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah bahwa secara ekonometrika ECM menganalisis keabsahan model baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan *error correction term*.

4.2.1 Hasil Uji Akar Unit (*unit root test*)

Langkah awal dalam pengujian ECM yaitu melalui pengujian *unit root test* dengan menggunakan uji ADF. Pengujian ini digunakan untuk melihat

kestasioneran data. Berdasarkan hasil uji ADF diketahui bahwa data yang digunakan pada tiga variabel dalam model penelitian yaitu variabel indeks pembangunan manusia, produj domestik bruto, dan variabel pengeluaran pemerintah hanya variable IPM yang stasioner pada *level*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik ADF yang lebih besar dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 5 persen. Sedangkan data variabel lainnya yaitu variabel produk domestik bruto dan pengeluaran pemerintah tidak stasioner pada *level*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai statistik ADF yang lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 5 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat untuk diestimasi dengan menggunakan metode ECM, karena minimal ada satu variabel yang tidak stasioner pada *level*.

Tabel 4.1.
Hasil Uji *Unit Root*

Variabe l	Nilai ADF	Nilai Kritis <i>MacKinnon</i>			Keterangan
		1%	5%	10%	
IPM	-3.194076	-3.808546	-3.020686	-2.650413	Stasioner
PDB	-5.244383	-4.571559	-3.690814	-3.286909	Stasioner**
PP	-8.176942	-4.532598	-3.673616	-3.277364	Stasioner*

Sumber : Lampiran 2

Keterangan : * = Stasioner pada 1st difference

** = Stasioner pada 2nd difference

Dari Hasil uji *Level* dapat diketahui bahwa variabel IPM stasioner in level, variable PDB Stasioner pada 2nd difference, variabel PP Stasioner pada 1st difference, dengan nilai statistik ADF yang lebih besar dari nilai kritis pada tingkat kepercayaan 5 persen pada semua variabel.

4.2.2 Hasil Uji Kointegrasi

Syarat yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa diantara variabel-variabel yang diteliti berkointegrasi adalah dengan melihat perilaku residual dari regresi persamaan yang digunakan, dimana residualnya harus stasioner. Hasil uji stasioneritas terhadap residual regresinya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4.2.
Hasil Uji Akar Terhadap Residual Persamaan Regresi

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.805806	0.0105
Test critical values: 1% level	-3.831511	
5% level	-3.029970	
10% level	-2.655194	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: Lampiran 3

Dari data Regresi kointegrasi didapatkan residunya Setelah itu kemudian data diolah dengan metode ADF untuk memastikan apakah nilai residu tersebut stasioner atau tidak. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai residu stasioner pada $\alpha= 5\%$, hasil ini dilihat dari nilai hitung ADF yang lebih besar dari nilai kritis mutlak pada $\alpha= 5\%$. Dengan terpenuhinya uji ini maka selanjutnya adalah analisis regresi ECM.

4.2.3 Hasil Error Correction Model (ECM) EG Dua Tahap

Model *Error Correction Model* (ECM) yang diajukan Engle-Granger memerlukan dua tahap, sehingga disebut dengan *two steps* EG. Tahap pertama adalah menghitung nilai residual dari persamaan regresi awal. Tahap kedua adalah

melakukan analisis regresi dengan memasukkan residual dari langkah pertama.

(Wing. Winarno, maret 2009)

Hasil Analisis Regresi dengan Metode OLS (Tahap Pertama)

$$\text{IPM} = 0.335291 + 2.49\text{E-}07 \text{ PDB} + -2.42\text{E-}07 \text{ PP} + 0.061518 \text{ DK}$$

$$\text{S. E} = (0.095655) \quad (8.52\text{E-}08) \quad (9.26\text{E-}08) \quad (0.026216)$$

$$t = (3.505216) \quad (2.926150) \quad (-2.618432) \quad (2.346544)$$

dimana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PDB : Produk Domestik Bruto

PP : Pengeluaran Pemerintah

DK : Dummy Krisis

S. E : Standar Error

t : t-Statistic

Sumber : lampiran 4

Dari hasil regresi awal ini dihitung nilai residualnya. Nilai residual awalnya didapatkan yaitu RESID01, lalu melakukan analisis dengan memasukkan residual RESID01.

Hasil Analisis Regresi OLS dengan Residual Periode Sebelumnya (Tahap Kedua)

$$\text{DIPM} = -0.033254 + -6.33\text{E-}08\text{DPDB} + -1.87\text{E-}07\text{DPP} + 0.022820\text{DK} + -0.533184 \text{ RESID01}(-1)$$

S. E	= (0.014407)	(1.06E-07)	(1.08E-07)	(0.016480)
	(0.193412)			
t	= (-2.308253)	(-0.597421)	(-1.719511)	(1.384741)
	(-2.756728)			
prob.	= (0.0357)	(0.5591)	(0.1061)	(0.1864)
	(0.0147)			

Sumber : Lampiran 5

Dari sini dapat kita lihat bahwa signifikansi residualnya. Nilai statistic t cukup tinggi (di atas 2) dan nilai Prob<0,05, ini menunjukkan bahwa model *Error Correction Model* (ECM) yang digunakan sudah valid. Dari sini dapat kita lihat bahwa dari tabel estimasi model ECM dapat diperoleh fungsi regresi OLS sebagai berikut :

$$DIPM = -0.033254 + -6.33E-08 DPDB + -1.87E-07 DPP + 0.022820 DK + -0.533184 RESID01(-1)$$

dimana :

DIPM : Perubahan Indeks Pembangunan Manusia

DPDB : Perubahan Produk Domestik Bruto

DPP : Perubahan Pengeluaran Pemerintah

DK : Dummy Krisis

RESID01(-1) : Residual Periode Sebelumnya

Besarnya koefisien jangka pendek dari masing-masing variabel independen ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independen yakni diperoleh dengan rumus $(b_1 + b_2)/b_t$ dimana b_1 = koefisien

regresi dari variabel independen yang mengandung lag_{t-1} $b_t =$ koefisien regresi RESID01.

Sedangkan variabel PDB dan PP merupakan variabel jangka panjang, hal ini berarti jika RESID01 signifikan pada 5%, maka ada hubungan antara ECM dengan uji kointegrasi, sehingga koefisien regresi jangka panjang merupakan besarnya kekuatan pengaruh variabel dependen oleh perubahan pada variabel independen dalam jangka panjang.

Serangkaian pengujian ekonometrik, uji statistik dan uji teori ekonomi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi ECM tersebut terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik.

4.2.4 Hasil Uji Diagnostik Model

Berdasarkan hasil penelitian yang dimanifestasikan dalam persamaan regresi yang digunakan, perlu dikaji apakah hasil tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, apakah hasil regresi telah memenuhi kaidah *best linier unbiased estimator* (BLUE) sehingga tidak ada gangguan serius terhadap asumsi klasik dalam metode regresi ECM yaitu masalah heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.2.4.1 Uji Heteroskedastisitas

Merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan uji whit yang menyatakan jika nilai chi-square hitung (χ^2) < chi-square tabel (χ^2) menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

$$\begin{aligned} \text{Chi-square tabel } (\chi^2) &= \{ \alpha; df \} \\ &= \{ 5; 7 \} \\ &= 14.0671 \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White *no cross terms*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.986416	Prob. F(7,12)	0.141458
Obs*R-squared	10.73535	Prob. Chi-Square(7)	0.150587

sumber : lampiran 6

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai determinasi (R^2) sebesar 10.73535, nilai chi-square hitung sebesar 0.150587 diperoleh dari white heteroskedasitas yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai chi square tabel (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 7 adalah 14.0671. karena nilai chi-square hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai chi-square (χ^2) tabel maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedasitas.

4.2.4.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk itu maka dilakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yaitu memasukkan variabel kelambanan (Lag).

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.062769	Prob. F(2,13)	0.939443
Obs*R-squared	0.191289	Prob. Chi-Square(2)	0.908787

Sumber : lampiran 7

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan Obs*R-Squared, dimana jika nilai probabilitas dari Obs*R-Squared melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima, artinya tidak ada masalah autokorelasi. Uji LM test ini bias dikatakan sebagai uji autokorelasi paling akurat (Kuncoro, 2001, 107).

Saat melakukan uji ini langkah pertama adalah memasukkan lag nya, dari hasil uji autokorelasi *Serial Corelation LM Test Lag 2* seperti terlampir dalam olah data diatas, terlihat bahwa F-Statistik sebesar 0.062769 dengan nilai probabilitas 0.939443. Sedangkan nilai Obs*R Squared tidak signifikan pada alfa 5% dengan kata lain nilai chi-squared hitung lebi kecil dari nilai kritis artinya tidak mengandung unsur Autokorelasi.

4.2.5 Analisis Statistik

Analisis statistik bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai signifikansi yaitu tingkat penting (nyata) secara statistik dan kebaikan sesuai (*goodness of fit*) variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, akan dijabarkan lebih lanjut tentang variabel-variabel tersebut secara individu (uji t), secara serempak (uji F), dan pengujian koefisien determinasi (R^2) dari hasil estimasi ECM.

4.2.5.1 Uji Secara Individual (uji t)

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74).

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \boxed{t = \frac{\beta}{Se\beta_i}}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas (peluang) menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$. Jika t-hitung < t-tabel, berarti H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-hitung > t-tabel, berarti H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Dengan menentukan tingkat signifikansi pada level $\alpha = 5\%$, maka akan diperoleh nilai t tabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= \{ \alpha ; (n-k) \} \\ &= \{ 0,05 ; (21-4) \} \end{aligned}$$

$$= \{0,05; 17 \}$$

$$= 1,740$$

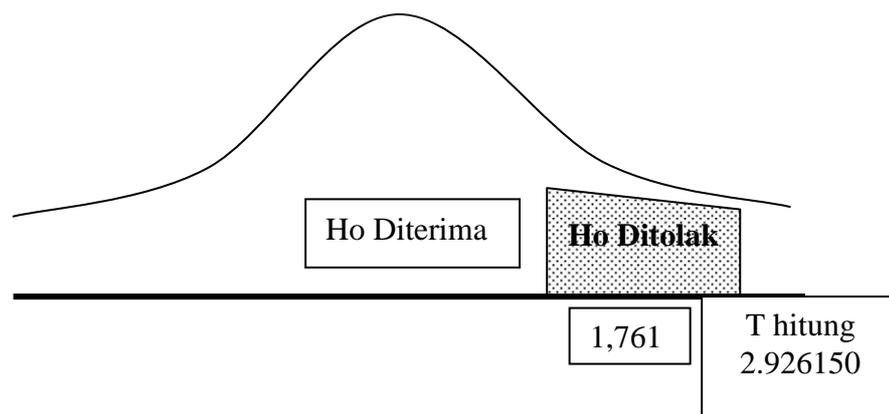
Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a) Pengujian terhadap variabel PDB (Produk Domestik Bruto).

Koefisien regresi dari variabel PDB (Produk Domestik Bruto) adalah $2.49E-07$ dan SE sebesar $8.52E-08$, sedangkan untuk t-hitung adalah 2.926150 . karena nilai t-hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak. Hal ini secara statistik diterima menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Alasan signifikan karena jika produk domestik bruto Indonesia itu naik ataupun turun, akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

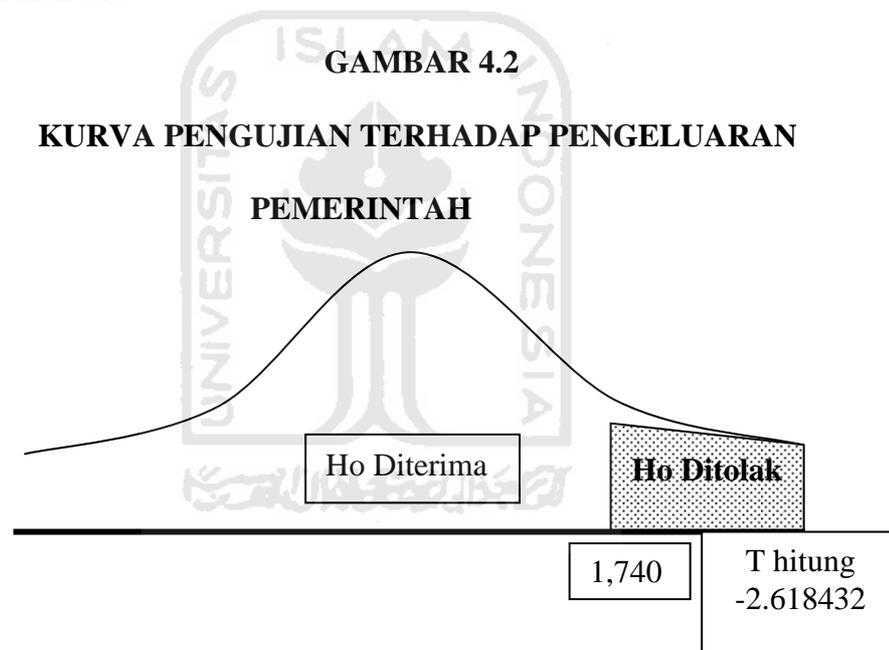
GAMBAR 4.1

**KURVA PENGUJIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK
BRUTO**



b) Pengujian terhadap variabel PP (Pengeluaran Pemerintah).

Koefisien regresi dari variabel PP (Pengeluaran Pemerintah) adalah $-2.42E-07$ dan SE sebesar $9.26E-08$, sedangkan untuk t-hitung adalah -2.618432 . Karena nilai t-hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Alasan signifikan karena jika pengeluaran pemerintah naik ataupun turun, akan mempengaruhi naik turunnya indeks pembangunan manusia.



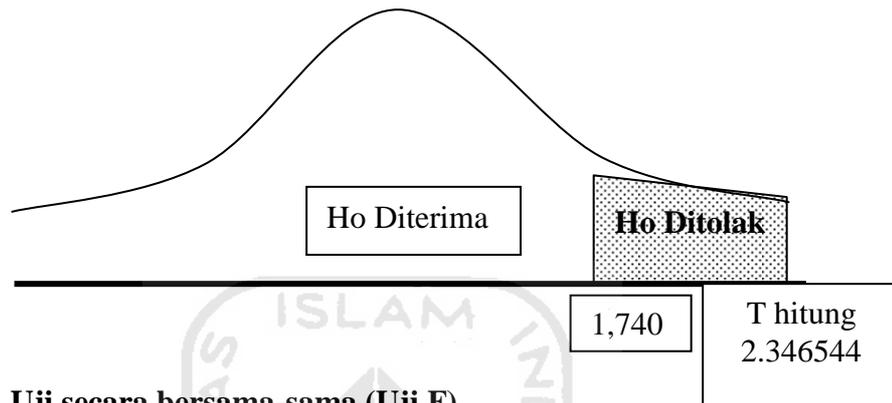
c) Pengujian terhadap variabel DK (Dummy Krisis)

Koefisien regresi dari variabel DK (Dummy Krisis) adalah 0.061518 dan SE sebesar 0.026216 , sedangkan untuk t-hitung adalah 2.346544 . Karena nilai t-hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa dummy krisis berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Alasan signifikan karena jika dummy krisis naik ataupun turun, akan mempengaruhi naik turunnya indeks pembangunan manusia.

GAMBAR 4.3

KURVA PENGUJIAN TERHADAP DUMMY KRISIS



4.2.5.2. Uji secara bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kriteria pengujian nilai F adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti berpengaruh secara serempak atau bersama-sama dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh secara serempak atau bersama-sama dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil pengolahan data diperoleh nilai F hitung adalah 8.944855 dengan probabilitas 0.000884, sedangkan F tabel adalah 3,20 , sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian, bahwa secara bersama-sama baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang variabel produk domestik bruto, pengeluaran

pemerintah dan dummy krisis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan derajat keyakinan 5 persen.

4.2.5.3. Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel independen. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0.612178 yang berarti variabel produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, dan dummy krisis dapat menjelaskan variasi mempengaruhi indeks pembangunan manusia sebesar 61.2178 persen, sedangkan sisanya sebesar 38.7822 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

4.2.6 Analisis Ekonomi

Setelah dilakukan beberapa hitungan dalam asumsi klasik dan uji secara statistik, maka kita lakukan analisis secara ekonomi terhadap semua variabel tersebut. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka panjang mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien sebesar 2.49E-07. Artinya, apabila PDB mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan IPM meningkat sebesar 2.49E-07 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan PDB maka IPM akan meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi dalam jangka panjang telah berhasil atau berjalan efektif. Sedangkan dalam jangka pendek PDB tidak signifikan dan akan menurunkan IPM, hal ini bisa terjadi karena dalam jangka pendek desentralisasi tidak berjalan efektif.

Anggaran pengeluaran pemerintah (PP) dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien dalam jangka panjang sebesar $-2.42E-07$ dan dalam jangka pendek sebesar $-1.87E-07$. Artinya, apabila PP mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan IPM menurun sebesar $-2.42E-07$ persen dalam jangka panjang dan sebesar $-1.87E-07$ dalam jangka pendek. Hal ini dapat terjadi karena pembangunan manusia di Indonesia masih sangat ditentukan atau masih sangat tergantung oleh pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi belum dapat berjalan efektif jika ditinjau dari pengeluaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah justru akan menurunkan IPM.

Krisis ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, dengan koefisien sebesar 0.061518 dalam jangka panjang dan sebesar 0.022820 dalam jangka pendek. Artinya, apabila krisis ekonomi mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan IPM meningkat sebesar 0.061518 persen dalam jangka panjang dan meningkat sebesar 0.022820. Hal ini memberi gambaran bahwa krisis ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan IPM, karena nilai koefisiennya yang kecil.

Hal ini dapat terjadi karena pada masa krisis ekonomi justru lebih banyak masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan usaha mandiri agar masyarakat terutama masyarakat tingkat bawah tetap dapat bertahan hidup meski dalam keadaan ekonomi yang sulit. Keberhasilan pemerintah untuk keluar dari krisis

juga memberi dorongan pada masyarakat untuk tetap dalam taraf hidup yang layak.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek :
 - a. Dengan menganggap bahwa variabel independen lainnya konstan, maka produksi domestic bruto dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
 - b. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
 - c. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, krisis ekonomi dalam jangka pendek berpengaruh positif namun pengaruhnya tidak terlalu besar.
2. Dalam jangka panjang
 - a. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, maka produksi domestic bruto dalam jangka panjang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
 - b. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

- c. Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, krisis ekonomi dalam jangka panjang berpengaruh positif namun pengaruhnya tidak terlalu besar.

5.2 Implikasi/Saran

Adapun hasil penelitian diatas penulis memberi implikasi/saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus meningkatkan produk domestic bruto, harus juga diimbangi dengan peningkatan teknologi agar kualitas barang ikut meningkat.
2. Pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator dalam proses pembangunan daerah agar pembangunan manusia tidak terlalu bergantung pada pengeluaran pemerintah.
3. Dengan memberikan subsidi kepada msyarakat akan lebih membantu peningkatan pembangunan manusia, tentu dengan syarat bahwa pemberian subsidi harus tepat sasaran dan dalam pengawasan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2003. *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Amin Wijaya Tunggal. 2005. *Memahami Konsep EVA (Economic Value Added) dan Value Based Manajement (VBM) Teori,soal,dan Kasus*. Jakarta: Havarindo.
- Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid. 1999. *Otonomi dan Federalisme, dalam Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Catur Sugiyanto. 1994. *Ekonometrika Terapan*.Yogyakarta: BPFE.
- Deeliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Djamin, Z. 1993. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djunasien dan Hidayat. 1989. *Ekonomi Indonesia: Masalah dan Prospek 1989/1990*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamaluddin, R. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi publik*, Yogyakarta : BPFE.
- Mangkoesebroto, G. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia, Substansi dan Urgensi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nuraini, Ida. 2005. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang : Penerbit UMM.
- Panglaykim, J. 1984. *Investasi Langsung Jepang di Kawasan Asean*. Jakarta: Andi Offset
- Purwanto, E.A., Kumorotomo, W.2005. *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer (eds)*. Yogyakarta: Gava Media.

- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2001. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Reksoprayitno, S. 1985. *Ekonomi Makro : Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. Yogyakarta : Liberty.
- Sekaran, Uma, 2003, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Willey & Sons.
- Setiyono, Budi. 2004. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Puskodak Fisip Undip.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria
- Syaukani, Affan Gaffar dan Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan*: Yogyakarta
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- Waluyo, Dwi Eko, 2001. *Teori Ekonomi Makro*, Malang : Penerbit UMM.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TAHUN	IPM	PDB	PP	DK
1990	0.499	949,641.10	49,450	0
1991	0.515	1,018,062.60	51,992	0
1992	0.637	1,081,248.00	58,166	0
1993	0.641	1,151,490.20	68,718	0
1994	0.668	1,238,312.30	72,342	0
1995	0.679	1,340,101.60	82,353	0
1996	0.643	1,444,873.30	95,022	0
1997	0.681	1,512,780.90	127,969	1
1998	0.67	1,314,202.00	215,586	1
1999	0.677	1,324,599.00	245,192	1
2000	0.684	1,389,770.20	241,606	1
2001	0.682	1,442,984.60	343,987	1
2002	0.692	1,504,380.60	352,299	1
2003	0.697	1,572,159.30	376,505	1
2004	0.711	1,660,579.00	435,717	1
2005	0.728	1,750,656.10	509,419	1
2006	0.726	1,847,126.70	699,099	1
2007	0.731	1,963,091.80	752,373	1
2008	0.712	2,082,456.00	985,731	1
2009	0.718	2,177,742.00	937,382	1
2010	0.613	2,310,690.00	1,126,147	1

Lampiran 2

Hasil uji akar IPM pada level

Null Hypothesis: IPM has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.194076	0.0356
Test critical values:		
1% level	-3.808546	
5% level	-3.020686	
10% level	-2.650413	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IPM)

Method: Least Squares

Date: 02/23/12 Time: 23:37

Sample (adjusted): 1991 2010

Included observations: 20 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM(-1)	-0.386162	0.120899	-3.194076	0.0050
C	0.264254	0.081280	3.251157	0.0044
R-squared	0.361750	Mean dependent var		0.005700
Adjusted R-squared	0.326292	S.D. dependent var		0.039987
S.E. of regression	0.032821	Akaike info criterion		-3.900845
Sum squared resid	0.019390	Schwarz criterion		-3.801272
Log likelihood	41.00845	F-statistic		10.20212
Durbin-Watson stat	1.971027	Prob(F-statistic)		0.005028

Hasil uji akar PDB pada 2nd difference

Null Hypothesis: D(PDB,2) has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.244383	0.0029
Test critical values: 1% level	-4.571559	
5% level	-3.690814	
10% level	-3.286909	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(PDB,3)
 Method: Least Squares
 Date: 02/23/12 Time: 23:38
 Sample (adjusted): 1993 2010
 Included observations: 18 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PDB(-1),2)	-1.297100	0.247331	-5.244383	0.0001
C	-11532.31	49348.61	-0.233691	0.8184
@TREND(1990)	1378.385	3913.182	0.352241	0.7296
R-squared	0.647226	Mean dependent var		2383.228
Adjusted R-squared	0.600189	S.D. dependent var		136098.6
S.E. of regression	86055.99	Akaike info criterion		25.71440
Sum squared resid	1.11E+11	Schwarz criterion		25.86279
Log likelihood	-228.4296	F-statistic		13.76004
Durbin-Watson stat	2.195225	Prob(F-statistic)		0.000404

Hasil uji akar PP pada 1st difference

Null Hypothesis: D(PP) has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic		-8.176942	0.0000
Test critical values:	1% level	-4.532598	
	5% level	-3.673616	
	10% level	-3.277364	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PP,2)

Method: Least Squares

Date: 02/23/12 Time: 23:41

Sample (adjusted): 1992 2010

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PP(-1))	-1.656719	0.202609	-8.176942	0.0000
C	-30183.20	27083.52	-1.114449	0.2815
@TREND(1990)	10673.48	2463.533	4.332590	0.0005
R-squared	0.807948	Mean dependent var		9801.211
Adjusted R-squared	0.783942	S.D. dependent var		112547.7
S.E. of regression	52314.51	Akaike info criterion		24.71187
Sum squared resid	4.38E+10	Schwarz criterion		24.86100
Log likelihood	-231.7628	F-statistic		33.65540
Durbin-Watson stat	1.824967	Prob(F-statistic)		0.000002

Tabel 4.1.
Hasil Uji *Unit Root*

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis <i>MacKinnon</i>			Keterangan
		1%	5%	10%	
IPM	-3.194076	-3.808546	-3.020686	-2.650413	Stasioner
PDB	-5.244383	-4.571559	-3.690814	-3.286909	Stasioner**
PP	-8.176942	-4.532598	-3.673616	-3.277364	Stasioner*

Keterangan : * = Stasioner pada 1st difference
** = Stasioner pada 2nd difference

Lampiran 3

Hasil Uji Akar Terhadap Residual Persamaan Regresi

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.805806	0.0105
Test critical values:		
1% level	-3.831511	
5% level	-3.029970	
10% level	-2.655194	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RESID01)

Method: Least Squares

Date: 01/31/12 Time: 02:27

Sample (adjusted): 1992 2010

Included observations: 19 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RESID01(-1)	-1.018505	0.267619	-3.805806	0.0016
D(RESID01(-1))	0.511344	0.238380	2.145083	0.0476
C	0.004812	0.007470	0.644221	0.5286
R-squared	0.479464	Mean dependent var		-0.001338
Adjusted R-squared	0.414397	S.D. dependent var		0.041192
S.E. of regression	0.031522	Akaike info criterion		-3.932316
Sum squared resid	0.015898	Schwarz criterion		-3.783194
Log likelihood	40.35700	F-statistic		7.368770
Durbin-Watson stat	1.496411	Prob(F-statistic)		0.005390

Lampiran 4

Hasil Analisis Regresi dengan Metode OLS (Tahap Pertama)

Dependent Variable: IPM
Method: Least Squares
Date: 01/30/12 Time: 13:02
Sample: 1990 2010
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.335291	0.095655	3.505216	0.0027
PDB	2.49E-07	8.52E-08	2.926150	0.0094
PP	-2.42E-07	9.26E-08	-2.618432	0.0180
DK	0.061518	0.026216	2.346544	0.0313
R-squared	0.612178	Mean dependent var		0.666857
Adjusted R-squared	0.543739	S.D. dependent var		0.061945
S.E. of regression	0.041842	Akaike info criterion		-3.340175
Sum squared resid	0.029763	Schwarz criterion		-3.141218
Log likelihood	39.07184	F-statistic		8.944855
Durbin-Watson stat	1.027321	Prob(F-statistic)		0.000884

Lampiran 5

Hasil Analisis Regresi OLS dengan Residual Periode Sebelumnya (Tahap Kedua)

Dependent Variable: DIPM
Method: Least Squares
Date: 01/30/12 Time: 13:03
Sample(adjusted): 1990 2009
Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.033254	0.014407	-2.308253	0.0357
DPDB	-6.33E-08	1.06E-07	-0.597421	0.5591
DPP	-1.87E-07	1.08E-07	-1.719511	0.1061
DK	0.022820	0.016480	1.384741	0.1864
RESID01(-1)	-0.533184	0.193412	-2.756728	0.0147
R-squared	0.527429	Mean dependent var		-0.005700
Adjusted R-squared	0.401410	S.D. dependent var		0.039987
S.E. of regression	0.030937	Akaike info criterion		-3.901386
Sum squared resid	0.014357	Schwarz criterion		-3.652453
Log likelihood	44.01386	F-statistic		4.185310
Durbin-Watson stat	2.033117	Prob(F-statistic)		0.017931

Lampiran 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode White *no cross terms*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.986416	Prob. F(7,12)	0.141458
Obs*R-squared	10.73535	Prob. Chi-Square(7)	0.150587

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/31/12 Time: 02:31

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001569	0.000844	1.860072	0.0876
DPDB	3.29E-09	5.36E-09	0.613424	0.5510
DPDB^2	-1.59E-14	4.20E-14	-0.378007	0.7120
DPP	-8.60E-10	9.75E-09	-0.088237	0.9311
DPP^2	-1.23E-14	4.79E-14	-0.255901	0.8024
DK	-0.001296	0.000696	-1.862111	0.0872
RESID01(1)	0.010913	0.010190	1.070857	0.3053
RESID01(1)^2	0.290362	0.252410	1.150355	0.2724

R-squared	0.536767	Mean dependent var	0.000718
Adjusted R-squared	0.266548	S.D. dependent var	0.001191
S.E. of regression	0.001020	Akaike info criterion	-10.64950
Sum squared resid	1.25E-05	Schwarz criterion	-10.25121
Log likelihood	114.4950	F-statistic	1.986416
Durbin-Watson stat	2.196598	Prob(F-statistic)	0.141458

Lampiran 7

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Metode LM Pada Lag 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.062769	Prob. F(2,13)	0.939443
Obs*R-squared	0.191289	Prob. Chi-Square(2)	0.908787

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/31/12 Time: 02:32

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000416	0.015799	0.026355	0.9794
DPDB	-3.52E-09	1.29E-07	-0.027409	0.9785
DPP	2.67E-09	1.16E-07	0.022895	0.9821
DK	-0.000998	0.017845	-0.055938	0.9562
RESID01(1)	-0.043087	0.239873	-0.179626	0.8602
RESID(-1)	-0.091300	0.340652	-0.268015	0.7929
RESID(-2)	-0.085065	0.323537	-0.262923	0.7967
R-squared	0.009564	Mean dependent var		-8.67E-18
Adjusted R-squared	-0.447560	S.D. dependent var		0.027489
S.E. of regression	0.033073	Akaike info criterion		-3.710996
Sum squared resid	0.014219	Schwarz criterion		-3.362490
Log likelihood	44.10996	F-statistic		0.020923
Durbin-Watson stat	1.884874	Prob(F-statistic)		0.999942